

Lampiran Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu

Nomor : /EK/I/2014

Tanggal : 2014

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA 2013-2018**

Nama Unit Organisasi : **Biro Perekonomian Setdaprovsu**

Tugas : Membantu menyusun konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dalam pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi di bidang pengembangan sumber daya alam, pengembangan usaha ekonomi daerah, pengembangan distribusi, industri dan perdagangan, pengembangan produksi pangan dan agrobisnis.

Fungsi : 

1. Menyiapkan dan Mengoordinasikan konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi di bidang pengembangan sumber daya alam, usaha ekonomi daerah, distribusi, industri, perdagangan, produksi pangan dan agrobisnis.
2. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang sumber daya alam, usaha ekonomi daerah, distribusi, industri, perdagangan, produksi pangan dan agrobisnis.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Sasaran Kinerja (2013)	Target Tahun 2014	Target Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2017	Target Tahun 2018	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin dan Pengawasan Garam.	1. Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing	-	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	6 BUMD	Laporan Akhir Tahun BUMD
		2. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.	-	13 Kali	26 Kali	30 Kali	32 Kali	32 Kali	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Laporan dari Produsen Pupuk Iskandar Muda
		3. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.	-	24 kali	48 kali	56 kali	64 kali	72 kali	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring
		4. Frekuensi Koordinasi dalam hal Penyaluran Raskin.	-	5 kali	20 kali	25 kali	30 kali	33 kali	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi

		5. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.	-	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	9 Kali	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi
--	--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------------

**a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,  
ub.  
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN**

  
**Drs. BONDHARO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580411 198103 1 010**





<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Kondisi Awal Sasaran Kinerja (2013)</b>	<b>Target Tahun 2014</b>	<b>Target Tahun 2015</b>	<b>Target Tahun 2016</b>	<b>Target Tahun 2017</b>	<b>Target Tahun 2018</b>	<b>SUMBER</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.	Tersusunnya Konsep Kebijakan Kepala Daerah di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin dan Pengawasan Garam	6. Jumlah Peraturan/ Keputusan yang diterbitkan dalam hal Pembinaan BUMD	3 Peraturan	6 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	5 Peraturan	Peraturan Keputusan diterbitkan
7. Peningkatan Peran BUMD yang berdaya saing		-	1 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	1 BUMD	1 BUMD	Laporan Keuangan yang bersangkutan	
8. Jumlah Peraturan/ Keputusan yang diterbitkan dalam hal Pengalokasian Pupuk Bersubsidi		3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	Peraturan Keputusan diterbitkan	
9. Pemerataan Peredaran Pupuk Bersubsidi bagi para petani di kab/kota		16 kabp/kota	16 kab/kota	20 kab/kota	24 kab/kota	28 kab/kota	33 kab/kota	Laporan Pengawasan	

		10. Jumlah Peraturan/ Keputusan yang diterbitkan dalam hal Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	Peraturan Keputusan diterbitkan
		11. Pengendalian harga terutama sembilan Bahan pokok	-	2 kab/kota	5 kab/kota	12 kab/kota	20 kab/kota	26 kab/kota	BPS dan
		12. Jumlah Peraturan/ Keputusan yang diterbitkan dalam hal Penyaluran Raskin.	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	Peraturan Keputusan diterbitkan
		13. Pemerataan Pendistribusian beras kepada penduduk miskin dan kurang mampu	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	Laporan Monitorin Laporan Bulog
		14. Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran garam beryodium di kab/kota	25 kab/kota	15 kab/kota	20 kab/kota	22 kab/kota	26 kab/kota	33 kab/kota	Laporan pengawasan oleh TIM

**a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Kabag I	.....
Kabag II	.....
Kabag III	.....
Kabag IV	.....

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,**

**ub.**

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN**

**Drs. BONDAHARO**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19580411 198103 1 010**